

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengapa riset ini penting untuk dibangun dan dikaji. Riset ini dibangun atau diawali dari isu pentingnya kemandirian benih dalam mencapai kemandirian pangan dan pembangunan berkelanjutan disebabkan permasalahan dalam tata kelola benih yang timbul, dimana tata kelola perbenihan masih dibangun secara parsial didalam kebijakan negara. Tata kelola perbenihan yang berfungsi dengan baik memastikan petani memiliki akses dan distribusi benih yang adil, transparansi dan akuntabilitas perbenihan, dorongan inovasi dalam pemuliaan dan produksi benih, perlindungan hak kekayaan intelektual benih, dan peningkatan kapasitas petani dalam mengelola benih. Tata kelola perbenihan yang baik didukung oleh kolaborasi antar *stakeholder* yang dapat mendorong kemandirian benih.

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses yang memiliki definisi berbeda-beda tergantung pada konteksnya (Laurett. et.al, 2020) Dalam konteks pertanian, pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan pertanian regeneratif, pelestarian keanekaragaman hayati, mempertahankan pengetahuan dan adat lokal, serta mendukung pembentukan ekonomi sirkular untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan (Shahmohamadloo.et.al, 2021). Konsep kedaulatan pangan telah menjadi perhatian sebagai alat *holistik* untuk menganalisis berbagai masalah dan peluang terkait pangan (Clapp, 2021; FAO, 2019; HLPE, 2023).

Salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia adalah mengakhiri kelaparan dengan mencapai ketahanan pangan, nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan menjadi kunci ketahanan dan kedaulatan pangan serta mendukung SDG 2 (Nol Kelaparan) (Viana *et al.*, 2022). Kedaulatan pangan, yang melibatkan berbagai teknologi dan aplikasi mulai dari pembibitan hingga pemasaran produk, hanya dapat tercapai jika kedaulatan dan kemandirian benih juga terjamin (Barthel.et.al, 2013). Sebab, benih merupakan fondasi utama dalam produksi pangan (Mcguire & Sperling, 2011).

Benih berkualitas adalah penentu produktivitas pangan. Sistem benih terbagi menjadi tiga jenis: formal, informal, dan integrasi. Sistem benih formal cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mampu menyediakan benih berkualitas tinggi dan seragam sesuai dengan standar nasional (Paturuhman & Sumarno, 2017), sedangkan sistem benih informal berfokus pada aksesibilitas benih, ketahanan pangan dan praktik lokal seperti pertukaran benih antar petani dan penggunaan benih hasil panen sebelumnya dianggap mampu memberikan fleksibilitas adaptasi terhadap kondisi agroekologi lokal dan kebutuhan petani kecil (Sperling & Almekinders, 2023), (Wyss, 2016). Sistem integrasi, yang menggabungkan keunggulan kedua sistem tersebut, bertujuan menciptakan tata kelola benih yang lebih inklusif dan adaptif (N. Louwaars & Jonge, 2021; Wyss, 2016).

Integrasi sistem benih formal dan informal dapat meningkatkan produktivitas tanaman padi dan kesejahteraan petani. Tabel 1 (satu) di bawah ini menunjukkan dampak penggunaan sistem benih integratif pada peningkatan produktivitas petani di beberapa negara Asia. Produktivitas padi meningkat hingga 15-22% tergantung pada negara dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Peningkatan Produksi Benih Padi Beberapa Negara Asia Tahun 2020

Negara	Produktivitas Awal (ton/ha)	Produktivitas Setelah Integrasi (ton/ha)	Peningkatan (%)	Sumber Data
Vietnam	5.2	6.3	21%	<i>IRRI Rice Statistics 2021</i>
Indonesia	4.8	5.6	17%	Kementan RI 2022
Bangladesh	4.5	5.3	18%	<i>BIRRI Annual Report 2021</i>
Thailand	4.3	5.0	16%	<i>Thai Rice Dept. 2021</i>
Filipina	3.9	4.5	15%	<i>PhilRice 2021</i>

Sumber : Hasil Analisis (2024)

Sementara dampak pelaksanaan sistem benih integrasi ini dari sisi pendapatan petani setempat dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Peningkatan Pendapatan Petani Negara Beberapa Negara Asia Setelah Penerapan Sistem Benih Integrasi

Negara	Pendapatan Sebelum (USD/ha/thn)	Pendapatan Setelah (USD/ha/thn)	Kenaikan (%)	Sumber Data
Vietnam	1,250	1,550	24%	IRRI 2021
Indonesia	980	1,180	20%	BPS 2021
Bangladesh	850	1,020	20%	BIRRI 2021
Thailand	1,100	1,300	18%	Thai Rice Dept. 2021
Filipina	800	950	19%	PhilRice 2021

Sumber : Hasil Analisis (2024)

Pada Tabel 2. dapat dilihat naiknya pendapatan petani antara 18-24% sebagai hasil dari adopsi sistem benih integratif. Peningkatan pendapatan ini karena petani sudah mengadopsi benih berkualitas. Hal menunjukkan bahwa integrasi sistem benih berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani di semua negara.

Sistem benih integrasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dengan meningkatkan ketersediaan benih berkualitas, mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, dan memperkuat keragaman genetik melalui kolaborasi semua pihak yang terlibat (N. P. Louwaars & Manicad, 2022). Dengan menggabungkan keunggulan sistem formal dan informal melalui sistem integrasi, dapat diciptakan tata kelola benih yang lebih efektif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Tata kelola benih yang efektif, mencakup pemuliaan, produksi, distribusi, sertifikasi, dan adopsi benih, dapat membantu mencapai kemandirian benih, yang menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi, perubahan iklim, dan faktor lingkungan lainnya (Isbell et al., 2023; N. P. Louwaars & Manicad, 2022). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian mencapai kemandirian pangan dan memberdayakan petani sebagai *stakeholder* utama dalam sistem pertanian (Kliem, 2022; Westengen et al., 2023).

Semua sistem perbenihan mencakup *stakeholder* yang saling terkait dan lembaga formal dan informal yang terlibat dalam konservasi keanekaragaman

tanaman, pengembangan varietas, produksi benih, penyebaran dan penggunaan benih (Haug et al., 2023). *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyatakan bahwa negara berkembang melibatkan *farm saved seed* oleh petani sendiri dan *commercial seed* melalui keterlibatan penangkar benih dan industri benih. Keterlibatan petani penangkar dan kelompok tani penangkar sebagai *stakeholder* sangat penting dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan mandiri benih (Amiruddin et al., 2016).

Kontribusi petani/kelompok tani sebagai *stakeholder* dalam tata kelola benih untuk mencapai kemandirian benih dilakukan di berbagai negara. Berikut beberapa bentuk kelembagaan petani sebagai *stakeholder* dalam tata kelola benih:

Tabel 3. Bentuk Kelembagaan Petani sebagai *Stakeholder*

No	Negara	Kelembagaan petani	Komoditi	Sumber Literatur
1	Filipina	asosiasi petani	sayur	(Kliem, 2022)
2	Indonesia	Kelompok Penangkar Tani	padi	(Amiruddin et al., 2016; Hatta et al., 2023)
3	Mali	Asosiasi petani	sorgum	(Christinck et al., 2018)
4	Chad	Asosiasi petani	wijen	(Tschersich et al., 2023)
5	Kenya	Asosiasi petani	sayuran	(Croft et al., 2018)
6	Ethiopia	Usaha petani benih skala kecil	Bawang merah	(Sisay et al., 2017)
7	Brasil	Usaha benih berbasis masyarakat-lembaga penelitian, dan NGO	kopi	(Civera et al., 2019)
8	Jerman	Asosiasi petani	sayuran organik	(Sievers-Glotzbach et al., 2020), (Tschersich et al., 2023)
9	Swiss	Asosiasi petani	sayuran organik	(Sievers-Glotzbach et al., 2020), (Tschersich et al., 2023)
10	Belanda	Asosiasi petani	sayuran organik	(Sievers-Glotzbach et al., 2020), (Tschersich et al., 2023)

Petani sebagai *stakeholder* memiliki kemampuan mengembangkan dan menangkarkan benih padi unggul lokal (Hatta *et al.*, 2023). Petani penangkar memiliki peluang besar melakukan pengembangan benih berkualitas sehingga akses mendapatkan benih berkualitas menjadi terbuka bagi petani. Kemandirian benih mencerminkan lestarnya benih lokal sekaligus kedaulatan petani kecil dan menengah atas benih lokal berkualitas dan membangun kemandirian kelompok atas kebutuhan benih anggotanya dapat tercapai (Supriyadi.*et.al*, 2018), (Westengen *et al.*, 2023).

Pemerintah Indonesia melaksanakan bantuan benih padi sejak tahun 2007 yang dimulai dengan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU). Program bantuan tersebut digantikan dengan bantuan subsidi benih melalui program 1000 Desa Mandiri Benih dan Model kawasan mandiri benih di tahun 2015, sebelum akhirnya pemerintah kembali memberikan bantuan benih gratis terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini. Alokasi bantuan benih padi gratis yang diberikan kepada para petani adalah 25 kg (padi inbrida) atau 15 kg (padi hibrida) per hektar lahan sawah irigasi. Berdasarkan data realisasi penyaluran benih dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dari Kementerian Pertanian, bantuan benih telah diberikan kepada 1,8 juta hektar lahan sawah padi per tahun dengan volume bantuan mencapai 43,9 juta benih. Bantuan yang diberikan sudah mencakup sekitar 30% dari total kebutuhan benih nasional. Untuk memenuhi bantuan benih tersebut, pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp3 triliun per tahun (Sisungkunon *et al.*, 2022)

Tata kelola benih di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Kebijakan ini mendukung integrasi sistem benih formal dan informal, sebagaimana tercermin dalam program-program seperti Program Perbenihan Nasional. Program ini bertujuan meningkatkan akses petani terhadap benih bersertifikat sekaligus memberdayakan komunitas penangkar benih lokal yang diberdayakan untuk memproduksi dan mendistribusikan benih dengan dukungan teknis dari pemerintah. Pemerintah telah melaksanakan program "1000 Desa Mandiri Benih" dan Model Kawasan Mandiri

Benih (MKMB), pelaksanaan 2 (dua) program tersebut seperti yang dijelaskan pada Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 4. Program Kemandirian Benih Pemerintah Republik Indonesia 2015-2019

No	Uraian	Model kawasan mandiri benih	1000 Desa Mandiri Benih
1	Tujuan	membina penangkar di daerah dimana petaninya memiliki tingkat adopsi benih bersertifikat rendah	memfasilitasi kelompok tani/petani penangkar atau Gabungan Kelompok Tani untuk meningkatkan kapasitas (<i>Capacity Building</i>) memproduksi benih untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya
2	Varietas yang digunakan	Benih bersertifikat	benih unggul dan benih lokal yang diminati oleh petani.
3	Pembinaan	Balai Penelitian (BB Padi , Balitsereal dan Balitkabi): teknologi benih sumber BPTP: teknis budidaya BPSBTPH: administrasi dan pemeriksaan di lapang/laboratorium BPTP: mengembangkan varietas baru sesuai spesifik Lokasi	Dirjen Tanaman Pangan
4	Pelaksana	Balitbangtan	Dirjen Tanaman Pangan, dan Dinas Pertanian provinsi / kabupaten.
5	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pembinaan kelembagaan, • Jaminan pasar tidak ada • Modal terbatas • Teknologi terbatas • pemilihan varietas tidak tepat • sarana usaha terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • kurang optimal pendampingan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, lembaga terkait lainnya • tidak adanya jaminan pasar, • pemilihan lokasi dan peserta tidak selektif, • komitmen dan motivasi peserta lemah • perencanaan dan penyediaan benih tidak sesuai,

Sumber: (Balitbangtan, 2015), (Sayaka dan Hidayat, 2015), (Darwis, 2018)

Pendampingan yang tidak optimal dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dan lembaga terkait lainnya menunjukkan rendahnya komitmen dalam membangun kerjasama yang solid. Faktor lain seperti ketiadaan jaminan pasar, pemilihan lokasi dan peserta yang tidak selektif, serta perencanaan yang kurang matang semakin memperburuk situasi ini. Lemahnya komitmen dan motivasi peserta, ditambah perencanaan dan penyediaan benih yang tidak sesuai, semakin menegaskan bahwa tanpa kolaborasi yang erat, program ini gagal mencapai tujuannya. Permasalahan di atas menunjukkan kelompok tani / petani penangkar belum memiliki posisi tawar yang setara dengan *stakeholder* lainnya dan memiliki peranan yang optimal dalam proses tata kelola benih karena kapasitas SDM dan teknologi yang terbatas (Raišienė & Skulskis, 2018).

Kegagalan program tersebut dapat diatribusikan dengan kurangnya kolaborasi yang efektif antar *stakeholder* terkait. Dengan demikian, kurangnya kolaborasi menjadi akar masalah yang menghambat keberhasilan program ini, sebagaimana didukung oleh berbagai literatur (Al-Tabbaa *et.al*, 2019; Wood & Gray, 1991). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya membangun kolaborasi yang optimal dalam tata kelola benih padi untuk mencapai kemandirian benih dan pangan. Kolaborasi memainkan peran penting dalam membangun relasi antar *stakeholder* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Dari fakta fakta pelaksanaan tata kelola benih di negara lain dan di Indonesia maka dapat disimpulkan di setiap wilayah memiliki beragam *stakeholder* yang terlibat dengan tujuan yang bervariasi sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan saat membangun tata kelola perbenihan. Petani/kelembagaan petani sebagai salah satu *stakeholder* memiliki posisi strategis dalam tata kelola benih yang menentukan pencapaian tujuannya. Tata kelola dipengaruhi oleh persaingan antar *stakeholder* yang terlibat untuk mendapatkan dukungan finansial dan politik, yang mempengaruhi kebijakan dan undang-undang. Mengintegrasikan kolaborasi dalam tata kelola benih menjadi relevan dalam mengatasi tantangan ini.

Komoditas padi dipilih dalam penelitian ini karena merupakan kebutuhan pokok nasional dan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar petani di Indonesia. Data menunjukkan bahwa 80% benih yang digunakan oleh petani

berasal dari sistem informal, dan hanya 20% dari sistem formal. Namun, sistem informal sering kali tidak mampu menjamin kualitas benih (Heindorf *et al.*, 2021). Dengan adanya penangkaran benih padi dalam sistem benih integrasi ini, petani diharapkan mudah mendapatkan benih yang bermutu untuk kegiatan usaha taninya dan meningkatkan usaha tani untuk konsumsi dan benih padi sebesar 20% yang digunakan untuk kebutuhan benih dengan nilai produksi padi naik 2 (dua) kali lipat (Supriyadi, 2017).

B. Rumusan Masalah

Keberadaan kelompok tani penangkar benih padi di Sumatra Barat, yang mencapai 111 kelompok dengan potensi produksi 941 ribu ton per tahun dengan nilai lebih kurang Rp. 12 Milyar/tahun., menjadi peluang besar untuk mengembangkan kemandirian benih berbasis lokal (BPS Sumatra Barat, 2023). Terdapat 18 varietas padi unggul lokal di Sumatra Barat yang telah dilepas secara nasional, namun distribusinya masih terkendala (BPSB Sumatra Barat, 2022). Keberadaan kelompok tani penangkar benih padi dan varietas lokal yang memiliki keunggulan merupakan potensi besar dalam pengembangan benih lokal.

Meskipun terdapat potensi besar dalam pengembangan benih lokal, serta peluang dari sistem benih integrasi yang diterapkan pemerintah melalui pengembangan benih lokal menjadi benih unggul, berbagai tantangan masih menghambat tercapainya kemandirian benih yang berkelanjutan. Tata kelola benih yang ada di Indonesia saat ini belum mampu menjamin pasar bagi kelompok tani penangkar benih (Darwis, 2018). Hal ini terjadi karena perencanaan produksi belum sesuai kebutuhan waktu, jenis, dan jumlah yang dibutuhkan oleh petani. (Sperling & Almekinders, 2023). Tantangan berikutnya adalah tingginya penggunaan benih lokal yang tidak berkualitas di kalangan petani. Hal ini memperparah tantangan dalam meningkatkan kualitas hasil panen dan pendapatan petani. Data menunjukkan bahwa 80% benih yang digunakan oleh petani berasal dari sistem informal, dengan 25% di antaranya diperoleh melalui barter atau transaksi sederhana tanpa jaminan kualitas (Kansiime *et al.*, 2021; Mulesa *et al.*, 2021; Pelzer *et al.*, 2017; Sperling & Almekinders, 2023).

Kolaborasi menjadi kunci solusi dalam mengatasi tantangan kemandirian benih yang berkelanjutan, karena permasalahan utama seperti tata kelola benih yang tidak efektif, rendahnya kualitas benih lokal, dan ketidaksetaraan posisi tawar petani penangkar disebabkan oleh kurangnya sinergi dan koordinasi antar *stakeholder*, termasuk pemerintah, institusi penelitian, dan kelompok tani. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya meningkatkan kapasitas SDM, teknologi, dan kelembagaan petani, serta menjamin pasar dan kualitas benih, akan sulit tercapai.

Kurangnya kolaborasi antar *stakeholder* yang terlibat menjadi akar masalah yang menghambat tata kelola benih padi untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap *stakeholder* cenderung bekerja secara terisolasi tanpa upaya koordinasi yang memadai. Menurut Frey (2006), kolaborasi yang efektif memerlukan hubungan yang kuat dan terstruktur, disertai pertukaran informasi serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Butcher dan Gilchrist (2020), kolaborasi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi yang baik, keterlibatan aktif, serta kemampuan untuk beradaptasi.

Tata kelola benih saat ini membutuhkan kolaborasi optimal dari berbagai *stakeholder*, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dan pangan, dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani untuk mewujudkan kemandirian benih dan pangan. Produsen benih lokal, seperti kelompok tani/petani penangkar, memiliki peran strategis dalam proses diseminasi varietas unggul dan menciptakan kawasan mandiri benih. Peningkatan posisi tawar *stakeholder* lokal ini dilakukan dengan cara pendampingan oleh *stakeholder* pemerintah, swasta, akademisi dan NGO. Adanya pendampingan ini, maka posisi penangkar benih diharapkan menjadi setara dengan *stakeholder* lainnya, meningkatkan level kolaborasi sekaligus peningkatan produksi dan kesejahteraan petani yang mewujudkan kemandirian benih dan pangan. Kolaborasi yang optimal sangat bergantung pada komunikasi yang baik, keterlibatan aktif, serta kemampuan untuk beradaptasi masing masing *stakeholder*.

Kolaborasi yang optimal dalam tata kelola benih menghasilkan tata kelola benih kolaboratif (*Collaborative Seed Governance*). *Collaborative Seed Governance* secara umum dapat di pahami bentuk peralihan optimal dalam

“penyelenggaraan kebijakan publik dalam perbenihan” yang tidak hanya pada berpusat pada pemerintah, namun melibatkan *stakeholder* lain untuk turut berpartisipasi baik dari masyarakat, swasta, dan lainnya. Produsen benih/kelompok tani penangkar memiliki peran yang penting dalam tata kelola benih padi khususnya dalam proses diseminasi varietas unggul yang dihasilkan oleh lembaga penelitian/ pemerintah dan menjamin tercapainya kawasan mandiri benih.

Penelitian terkait tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat masih terbatas. Kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor internal organisasi atau *stakeholder* tanpa menggali secara mendalam tentang kolaborasi antar-*stakeholder* dalam tata kelola benih. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi serta merumuskan model tata kelola benih kolaboratif untuk mewujudkan kemandirian benih berbasis lokal. Oleh sebab itu penelitian ini menambahkan kajian yang mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola benih padi unggul lokal serta menghubungkan bagaimana faktor faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar *stakeholder* dan level kolaborasi dalam tata kelola benih padi varietas lokal. Model ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mengantarkan “kesetaraan posisi” bagi produsen benih/kelompok tani/petani penangkar yang terlibat dalam upaya mencapai kemandirian benih dan peningkatan kesejahteraan kelompok tani/petani penangkar sebagai pelaku utama.

Berbagai pertanyaan spesifik yang diidentifikasi dan dicari jawabannya sebagai berikut:

- a. Siapa dan bagaimana peran *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini?
- c. Bagaimana level kolaborasi antar *stakeholder* tersebut dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini?
- d. Apa rumusan model untuk mendukung tata kelola kolaboratif benih padi unggul lokal yang memperkuat posisi strategis *stakeholder* lokal menuju kemandirian benih di Sumatra Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan model kolaborasi *stakeholder* yang sehingga mampu mewujudkan transformasi peranan petani penangkar/kelompok tani padi selaku *stakeholder* perbenihan dengan mengetahui dan memiliki kemampuan memproduksi benih padi varietas lokal berkualitas yang mendorong lahirnya kolaborasi yang optimal dalam tata kelola benih padi unggul lokal untuk mewujudkan kemandirian benih. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Memetakan peran *stakeholder* yang terlibat dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini.
- c. Menganalisis level kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat saat ini.
- d. Merumuskan model tata kelola benih kolaboratif yang memperkuat posisi strategis *stakeholder* lokal dalam tata kelola benih padi unggul lokal menuju kemandirian benih di Sumatra Barat.

D. Proposisi Penelitian

Tata kelola benih padi unggul lokal saat ini mengalami kendala sehingga kemandirian benih dalam kawasan pertanian belum tercapai. Diduga kolaborasi dalam tata kelola benih padi unggul lokal saat ini oleh *stakeholder* baik produsen benih lokal, swasta, pemerintah, perguruan tinggi/lembaga penelitian serta LSM belum optimal. Kemandirian benih sebagai hasil akhir dari tata kelola benih akan terwujud bila melibatkan kolaborasi berupa partisipasi aktif dari semua *stakeholder*, mekanisme koordinasi yang jelas, dan dukungan kebijakan yang kondusif. Model kolaborasi ini memperkuat posisi “*stakeholder* lokal” dalam hal ini kelompok tani/petani penangkar setara dengan *stakeholder* lainnya.

E. Manfaat Penelitian

- a. Kontribusi dari sisi akademis atau pengembangan ilmu
Manfaat penelitian ini dari sisi akademis atau pengembangan ilmu adalah memperkaya khasanah keilmuan tentang kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi varietas unggul lokal di Sumatra Barat.
- b. Kontribusi dari sisi praktis atau kebijakan
Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholder* untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola benih padi unggul lokal yang melibatkan *stakeholder* lokal menuju kemandirian benih di Sumatra Barat dengan potensi benih padi unggul lokal yang besar dalam menjamin kesejahteraan petani.

F. Novelty (Kebaruan) Penelitian

Tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat menghadapi tantangan yang berakar kepada belum tercapainya kolaborasi yang optimal antar *stakeholder*. Belum optimalnya kolaborasi ini menghambat kemampuan antar *stakeholder* untuk mencapai tujuan kemandirian benih dan keberlanjutan dalam konteks pertanian lokal. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan dalam bidang tata kelola benih pertanian, penelitian yang secara khusus mengeksplorasi kolaborasi yang terjadi antara *stakeholder* dalam konteks benih padi unggul lokal di daerah ini belum pernah dilakukan.

Berdasarkan dari hasil proposisi penelitian, yang dikembangkan melalui hasil penelitian terdahulu maka diidentifikasi *research gap*, diperoleh *novelty* dari penelitian ini yaitu:

1. Kerangka peran dan hubungan antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat
2. Level kolaborasi antar *stakeholder* dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat.
3. Rumusan model tata kelola benih kolaboratif melalui konsep pendekatan kolaborasi antar *stakeholder* ke dalam tata kelola benih padi unggul lokal di Sumatra Barat untuk mencapai kemandirian benih.